

Potensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi Pasar

di Kabupaten Bantul Tahun 2000 - 2004

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Ita Dewi Hastuti

Nomor Mahasiswa : 01.313.199

Program studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

Potensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul

Tahun 2000-2004

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ita Dewi Hastuti

Nomor Mahasiswa : 01313199

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

PENGESAHAN

Potensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul

Tahun 2000-2004

Nama : Ita Dewi Hastuti
Nomor Mahasiswa : 01313199
Program Studi : Ekonomi Pembangunan



Yogyakarta, 8 Juli 2006

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Drs. Nur Feriyanto, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan buat:.....

Allah SWT tempat aku berlindung tempat aku meminta petunjuk,

Keluarga Besar Bapak-Ibu yang selalu membuat aku menjadi yang

terbaik,memberikan aku support,cinta,dan kedamaian

Kakakku yang selalu jadi panutan aku,Adikku yang kusayangi,

Abangku yang slalu senantiasa memberikan motivasi,ketegaran dan semangat

12. temen 8 kost dijogja makasih selama ini membuat aku banyak temen, membuat aku selalu tersenyum.....

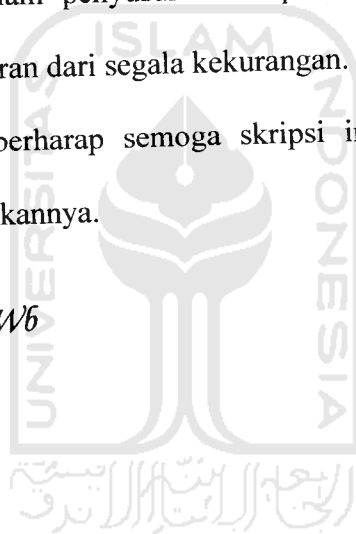
13. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan sesuai dengan bantuan yang penulis terima.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan di dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segala kekurangan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, Juli 2006

Penulis

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Juli 2006

Penulis,

Ita Dewi Hastuti

HALAMAN MOTTO

*Barang siapa yang yang tidak mengenal tujuan yang ditempuhnya
maka akan menjadi lamalah perjalanan yang ditempuhnya, ia menjadi
lelah dan payah karenanya, bahkan tidak dapat meraih apa yang
ditujunya!!*

(Sabda Nabi Muhammad SAW)

*Janganlah engkau tinggal di suatu tempat yang penduduknya zhalim karena ia
akan menghancurkan hatimu,kecuali bila kau terikat dengannya,Pindahlah ke
Barat, kau akan beroleh manfaat atau pergilah ke timur jika keinginanmu
mengarah ke sana.....*

(K.H. Masyhuri Syahid,M.A)

*Kita mencintai orang lain bukan karena diri orang yang dicintai itu tetapi
karena mereka membuat kita merasa dicintai*

(Irwin Federman)

*Sungguh rugi orang yang tidak mampu menikmati hidup lantaran terbelenggu
perasaan – perasaan cemas, khawati,tegang, dan pikiran kalut*

(K.H. Abdullah Gymnastiar)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yang mana merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan study di Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Skripsi ini disusun sesuai dengan data yang penulis dapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung di daerah penelitian, dengan seksama dan hati-hati agar dalam penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang diperoleh pada penulisan skripsi ini dari hasil penelitian retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun dari 2000-2004.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, penulisan skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu tidaklah berlebihan bilamana penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Asma'i Ishak, M.Bus.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Nur feriyanto, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang mana telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Dipenda Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Ekonomi Pembangunan yang memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada mahasiswa pada umumnya dan penulis pada khususnya.
5. Kedua orang tuaku bpk Midiy,dan ibu sri mulyani yang senantiasa mendoakan aku menjadi anak yang berbakti, rajin, solehah ,
6. Kedua saudaraku, mbak novi ,SE makasih ya mbak kritiknya kadang2 pedes tapi tetep bikin aku semangat.dan buat adekku Ade putra jangan bandel dan nakal ya kasihan bpk ibu semangat terus jangan mundur OK!!
7. Abangku Adi Ogeng makasih saran, kritik, dukungan, kasih sayangnya yang tulus yang selama ini abang berikan dan makasih bantuin non tuk nyelesaiin skripsi.....
8. Pak Gunawan, makasih banget ya pak atas bantuan, nasehat dan bimbingannya selama ini, dan aku tidak akan melupakan jasa-jasa pak gun.
9. sobatku rindu afi yang skarang udah jadi ibu post makasih ya ndu saran dan bimbingannya sekali lagi aku selalu bikin kamu repot.....kapan gomet lagi aku tunggu ya.....
10. In the sekawan risa wah wah rhs ada dikamu ya,and mbak yu imel memang salut dan top bgt 2 jempol buat kamu,adekku cimooet citra piye piye bagi bagi mujarape to adekku....jgn sampai bubar yo kita in the sekawan.....
11. konco-koncoku Anak EP 01,deni,deky ceper,cemplon,zaky,vijay dut ayyo to konco semangat dikit jangan molor terus kayak katok kolor...(he he he)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xiii
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL.....	8
2.1. Keadaan Geografis.....	8
2.2. Luas Wilayah.....	9
2.3. Keadaan Penduduk.....	11
2.4. Tenaga Kerja.....	15
2.5. Pendidikan.....	16
2.6. Pemerintahan.....	17
2.7. Perindustrian.....	18
2.8. Perekonomian.....	20

2.9.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	24
2.10.	Retribusi Daerah	25
2.11.	Retribusi Pasar.....	26
2.12.	Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan serta Besarnya Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul.....	27
BAB III	KAJIAN PUSTAKA.....	30
BAB IV	LANDASAN TEORI.....	34
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	34
4.1.1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
4.1.2.	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	36
4.2.	Retribusi Daerah	38
4.2.1.	Definisi Retribusi Daerah	38
4.2.2.	Ketentuan Umum Retribusi Daerah	40
4.2.3.	Jenis Retribusi Daerah	42
4.2.4.	Obyek Retribusi Daerah.....	49
4.2.5.	Subyek Retribusi Daerah	49
4.2.6.	Kinerja Pungutan Retribusi Daerah.....	50
4.3.	Pengertian Pasar.....	56
4.4.	Retribusi Pasar	58
4.4.1.	Pengertian Retribusi Pasar.....	58
4.4.2.	Obyek Retribusi Pasar	59
4.4.3.	Subyek Retribusi Pasar.....	60
4.4.4.	Penagihan Retribusi Pasar	61
4.4.5.	Dasar Hukum Pungutan retribusi Pasar.....	62
4.4.6.	Hak, Kewajiban, dan Larangan Retribusi Pasar .	63
BAB V	METODE PENELITIAN	66
5.1.	Jenis Penelitian.....	66
5.2.	Jenis Data.....	66

5.3. Lokasi Penelitian	66
5.4. Metode Pengumpulan Data	66
5.5. Metode Analisis Data	67
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	69
6.1. Analisis Potensi Retribusi Pasar	69
6.2. Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar	72
6.3. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar	74
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	76
7.1. Kesimpulan	76
7.2. Implikasi	77



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi dan target penerimaan retribusi pasar Kabupaten Bantul tahun 2000-2004.....	4
2.1. Batas Wilayah Kabupaten Bantul.....	8
2.2. Luas Wilayah Kabupaten Bantul Dirinci Menurut Kecamatan.....	10
2.3. Banyaknya Penduduk Akhir Tahun menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2004	11
2.4. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2000 – 2004....	12
2.5. Banyaknya Desa/Kelurahan, KK, dan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bantul	13
2.6. Mutasi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2004....	14
2.7. Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul 2004	15
2.8. Jumlah Sekolah di Kabupaten Bantul dirinci menurut kecamatan Tahun 2002.....	17
2.9. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Biaya Produksi dan Nilai Output Sektor Industri Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2004	19
2.10. Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar atau Sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2004.....	20
2.11. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Bantul Tahun 2000 – 2004	22

2.12.	Rekapitulasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul 2004	23
2.13.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004	25
2.14.	Pertumbuhan Retribusi daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004	26
2.15.	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul..... Tahun 2000 – 2004	27
2.16.	Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul.....	28
2.17.	Penggolongan Pasar Berdasarkan Kelas.....	29
4.1.	Kriteria Kinerja Keuangan Efektivitas Retribusi.....	54
4.2.	Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi Retribusi.....	55
5.1.	Potensi dan Penerimaan Retribusi Pasar Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2000 – 2004.....	69
5.2.	Potensi dan Penerimaan Retribusi Pasar Hewan di Kabupaten Bantul Tahun 2000 - 2004.....	70
5.3.	Potensi dan Penerimaan Retribusi Pasar Umum dan Pasar Hewan di Kabupaten Bantul Tahun 2000 - 2004.....	71
5.4.	Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 2000 – 2004	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Jumlah hari pasar.....	82
II. Tarif retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul.....	83
III. Jumlah hari pasaran pasar hewan di Kabupaten Bantul	84
IV. Tarif pasar hewan di Kabupaten Bantul	84
V. Efektivitas retribusi pasar tahun 2000 – 2004	84
VI. Upah pungutan retribusi pasar tahun 2000 - 2004	85
VII. Tingkat pertumbuhan retribusi pasar tahun 2000 - 2004.....	85
VIII. Jumlah pedagang pasar di Kabupaten Bantul tahun 2000-2004	86
IX. Potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 2000....	87
X. Potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 2001	88
XI. Potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 2002....	89
XII. Potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 2003....	90
XIII. Potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 2004....	91
XIV. Potensi retribusi pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 2000 ...	92
XV. Potensi retribusi pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 2001 ...	92
XVI. Potensi retribusi pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 2002 ..	92
XVII. Potensi retribusi pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 2003 ..	92
XVIII. Potensi retribusi pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 2004..	93
XIX. Total potensi pasar Kabupaten Bantul tahun 2000-2004.....	93

ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun berdasarkan sebagai hasil penelitian tentang Potensi dan Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2000-2004. Penulis menggunakan analisis yang mengukur potensi dan efektivitas pasar di Kabupaten Bantul pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu potensi retribusi pasar terhadap target penerimaannya adalah lebih besar sehingga untuk potensi pasar di Kabupaten Bantul dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam meningkatkan PAD. Sedangkan efektivitas sudah bisa digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi pasar yang sangat efektif.



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan kerja bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*Deddy S dan Dadang S, 2001, 168*).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang sebagai perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah.

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah nantinya diharapkan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dapat mengatur kewenangan dan kekuasaan dalam membentuk dan melaksanakan berdasarkan aspirasi, prakarsa dan keputusan daerah semaksimal mungkin. Guna menyongsong terealisasinya harapan yang dimaksud, maka diperlukan kesiapan dana (finansial) yang cukup besar serta peningkatan sumber daya manusianya agar mengelola keuangan dan penataan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 21 tentang Hak dan Kewajiban Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya..
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD sendiri terdiri atas: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang terdiri atas: pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa retribusi dikenakan yang bersangkutan secara langsung mendapatkan keuntungan dari suatu pelayanan tertentu, sehingga retribusi tersebut dikenakan sebagai bentuk imbalan yang digunakan untuk membiayai baik sebagian atau seluruh pelayanan yang diberikan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sedang berkembang, sehingga dibutuhkan banyak sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan daerahnya, sehingga pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah, mengingat masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga

perlu adanya usaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang diantaranya dengan meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Di Kabupaten Bantul sendiri penerimaan retribusi terutama retribusi pasar dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut kadang tidak sesuai dengan target pemerintah. Peningkatan tersebut sebesar 10 % yang sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah pedagang yang dari tahun ke tahun meningkat. Selain itu banyak hal-hal yang juga mempengaruhi peningkatan retribusi pasar di kabupaten Bantul yang mana nantinya penulis akan menelitinya.

Tabel 1.1.

**Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 2000-2004**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)
2000	689.937.950	675.000.000
2001	574.724.340	550.000.000
2002	830.073.960	791.176.000
2003	882.883.410	957.067.220
2004	965.943.135	957.069.180

Sumber: Bantul dalam Angka 2004

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti besarnya potensi, dan efektivitas retribusi pasar. Untuk itu penulis mengambil judul **“Potensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul tahun 2000 - 2004”**.

I.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000- 2004?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 – 2004?
3. Seberapa besar tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 – 2004?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 - 2004.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 – 2004.
3. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000– 2004.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul akan menjadi bahan pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang dalam mengelola pungutan retribusi pasar, khususnya dalam penetapan target retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan PAD untuk menunjang kelancaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum subyek penelitian. Dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari proses ini ditemukan kelemahan/kekurangan pada penelitian yang lalu sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sekaligus dihindari publikasi.

BAB IV LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik. Kalau ternyata hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian baik sesuai dengan teori ataupun harapan umum yang berlaku, maka peneliti harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut dapat terjadi.

BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bagian simpulan berisi tentang simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari sesi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sedang pada bagian implikasi muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi dari teoritis penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

2.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa bagian Tengah. Secara administratif Kabupaten Bantul berbatasan dengan beberapa kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian selatan wilayah Kabupaten Bantul berbatasan dengan Samudera Indonesia, bagian utara berbatasan dengan kota Yogyakarta, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Imogiri, Jetis, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu.

TABEL 2.1.

Batas Wilayah Kabupaten Bantul

Sebelah/Bagian	Perbatasan
1. Utara	Kota Yogyakarta dan Kabupaten
2. Timur	Sleman
3. Barat	Kabupaten Gunung Kidul
4. Selatan	Kabupaten Kulon Progo Samudera Indonesia

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

Secara Geografis maupun topografis, wilayah Kabupaten Bantul memiliki wilayah dengan posisi yang menguntungkan. Secara geografis wilayah Kabupaten Bantul terletak pada posisi antara $110^{\circ} 18' 40''$ sampai $110^{\circ} 34' 40''$ bujur timur dan $7^{\circ} 44' 50''$ sampai $8^{\circ} 37' 40''$ lintang selatan.

Secara topografis dan fisiografis Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dataran di daerah di Kabupaten Bantul sebagian besar dilalui enam sungai, yaitu: sungai Oya, sungai Opak, sungai Progo, sungai Winongo, sungai Code, dan sungai Bedog sehingga Kabupaten Bantul merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

2.2. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506.850 Ha yang terbagi dalam 17 kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Imogiri dengan luas wilayah 57.810 Ha (11,41 %), dan kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan dengan luas wilayah 18.340 Ha (3,62 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 2.2.

TABEL 2.2.

**Luas Wilayah Kabupaten Bantul
Dirinci menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas (%)
Srandakan	18.340	3,62
Sanden	23.270	4,59
Kretek	25.500	5,03
Pundong	23.760	4,69
Bambanglipuro	22.820	4,50
Pandak	24.290	4,79
Bantul	21.990	4,34
Jetis	25.600	5,05
Imogiri	57.810	11,41
Dlingo	56.340	11,12
Pleret	21.280	4,20
Piyungan	33.120	6,53
Banguntapan	26.290	5,19
Sewon	26.760	5,28
Kasih	32.380	6,39
Pajangan	33.190	6,55
Sedayu	34.110	6,73
Jumlah	506.850	100,00

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

2.3. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk sampai akhir tahun 2004 adalah 796.863 jiwa yang tersebar di 75 Desa di 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut 390.534 jiwa adalah laki-laki dan 406.329 jiwa adalah perempuan. Pertumbuhan penduduk tahun 2004 sebesar 0,90 % sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan luas wilayah 506,85 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2004 adalah 1.572.

TABEL 2.3.

Banyaknya Penduduk Akhir Tahun menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul

2004

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Srandakan	14.135	15.107	29.242
2. Sanden	16.461	17.534	33.995
3. Kretek	14.917	16.029	30.946
4. Pundong	15.942	17.069	33.011
5. bambanglipuro	20.595	22.237	42.832
6. Pandak	23.858	24.495	48.353
7. Bantul	28.469	29.738	58.207
8. Jetis	24.011	25.570	49.581
9. Imogiri	27.00	29.162	56.562
10. Dlingo	17.826	18.872	36.698
11. Pleret	16.894	17.239	34.133
12. Piyungan	18.602	19.337	37.939
13. Banguntapan	38.271	39.252	77.523
14. Sewon	38.247	37.852	76.099
15. Kasihan	38.975	39.069	78.044
16. Pajangan	14.636	15.499	30.135
17. Sedayu	21.295	22.268	43.563
Jumlah	390.534	406.329	796.863

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

TABEL 2.4.

**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul
Tahun 2000 - 2004**

Tahun	Jumlah Penduduk	% Pertumbuhan
2000	769.663	0,71
2001	776.624	0,90
2002	783.060	0,83
2003	789.745	0,85
2004	796.863	0,90

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

2. Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2004 adalah 1.572 jiwa per km² dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 200.107 maka rata-rata ada 3,98 jiwa dalam satu KK. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kasihan dengan jumlah penduduk sebesar 77.100 jiwa, dan wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Srandakan dengan tingkat kepadatan sebesar 29.203 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.5.

TABEL 2.5.

**Banyaknya Desa/Kelurahan, KK, dan Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Bantul
2004**

Kecamatan	Desa/Kelurahan	KK	Jumlah
1. Srandakan	2	7.571	29.242
2. Sanden	4	8.777	33.995
3. Kretek	5	7.800	30.946
4. Pundong	3	9.683	33.011
5. bambanglipur	3	9.934	42.832
6. Pandak	4	12.147	48.353
7. Bantul	5	14.055	58.207
8. Jetis	4	13.939	49.581
9. Imogiri	8	13.393	56.562
10. Dlingo	6	9.690	36.698
11. Pleret	5	10.324	34.133
12. Piyungan	3	10.189	37.939
13. Bnguntapan	8	17.427	77.523
14. Sewon	4	24.811	76.099
15. Kasihan	4	15.652	78.044
16. Pajangan	3	7.132	30.135
17. Sedayu	4	9.582	43.563
Jumlah	75	200.107	796.863

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

3. Mutasi Penduduk

TABEL 2.6.

**Mutasi Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bantul
Tahun 2004**

Kecamatan	Mutasi Penduduk				Pertumbuhan Penduduk
	Lahir	Datang	Pergi	Mati	
Srandakan	227	89	159	118	39
Sanden	323	60	146	177	60
Kretek	331	222	160	150	243
Pundong	235	118	113	106	134
Bmbanglipuro	403	330	279	208	246
Pandak	459	214	226	209	238
Bantul	640	772	443	342	627
Jetis	480	477	272	185	500
Imogiri	610	257	247	284	336
Dlingo	315	166	64	92	325
Pleret	284	2.152	260	123	153
Piyungan	231	285	144	89	283
Banguntapan	551	1.964	904	250	1.361
Sewon	744	1.023	561	338	868
Kasih	904	1.071	670	361	944
Pajangan	327	165	190	108	194
Sedayu	559	558	290	260	567
Jumlah	7.623	8.023	5.128	3.400	7118

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

2.4. Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2004 tercatat sebanyak 14.657 jiwa. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.496 orang dan perempuan sebanyak 8.161 orang . Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan penempatan tenaga kerja tahun 2002 yang hanya 1.601 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 423 orang dan perempuan 1.178 orang.

TABEL 2.7.
**Penempatan Tenaga Kerja
 Di Kabupaten Bantul
 2004**

Mekanisme Penempatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten	6.125	6.913	13.038
Propinsi	73	842	915
Luar Negeri	298	406	704
Jumlah	6.496	8.161	14.657

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

2.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga kerja pengajar yang memadai. Berdasarkan data dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2002, jumlah SD Negeri di Kabupaten Bantul sebanyak 383 buah, SD Swasta 66 buah, SLTP Negeri 48 buah, SLTP Swasta 46 buah, SMU Negeri 19 buah, SMU Swasta 20 buah, SM Kejuruan Negeri 7 buah, dan SM Kejuruan Swasta 19 buah.



TABEL 2.8.

**Jumlah Sekolah di Kabupaten Bantul
Dirinci Menurut Kecamatan
Tahun 2002**

Kecamatan	SD		SLTP		SMU		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Srandakan	13	5	2	1	1	0	0	1
Sanden	18	2	2	3	1	0	0	0
Kretek	21	1	2	2	1	1	0	2
Pundong	15	8	2	2	1	0	0	0
Bambang Lipuro	18	8	2	4	1	2	0	1
Pandak	24	5	4	1	0	0	0	1
Bantul	25	6	4	8	3	5	1	5
Jetis	23	4	3	1	1	0	1	0
Imogiri	29	1	3	3	1	1	0	2
Dlingo	29	0	2	5	1	1	0	0
Pleret	17	4	3	1	1	1	0	0
Piyungan	24	1	2	3	1	1	0	4
Bangun Tapan	28	8	5	4	2	2	0	1
Sewon	30	3	4	1	1	2	1	0
Kasih	30	7	3	5	1	2	3	0
Pajangan	15	1	3	1	1	0	0	0
Sedayu	24	2	2	1	1	2	1	2
Jumlah	383	66	48	46	19	20	7	19

Sumber: Bantul dalam Angka 2004

2.6. Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dikepalai oleh seorang Bupati. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang yang berasal dari 6 fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (13 orang), Fraksi Kebangkitan Bangsa (8 orang), Fraksi

Amanat Nasional (7 orang), Fraksi Kesatuan (7 orang), Fraksi Golongan Karya (5 orang), dan Fraksi TNI-POLRI (5 orang).

Dari 45 orang anggota dewan tersebut ada 4 orang diantaranya sebagai pimpinan dewan dan lainnya terbagi dalam 5 komisi, yang terdiri dari: Komisi A (pemerintahan) berjumlah 8 orang, Komisi B (perekonomian) berjumlah 8 orang, Komisi C (keuangan) berjumlah 9 orang, Komisi D (pembangunan) berjumlah 8 orang dan Komisi E (Kesra) berjumlah 8 orang.

Pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari pegawai otonomi daerah dan pegawai vertikal. Pegawai otonomi daerah berjumlah 12.733 orang yang terdiri dari: golongan I berjumlah 333 orang, golongan II berjumlah 2.703 orang, golongan III berjumlah 7.132 orang, dan golongan IV berjumlah 2.565 orang. Sebanyak 7.096 orang laki-laki dan 5.637 orang perempuan. Sedangkan pegawai negeri vertikal di Kabupaten Bantul berjumlah 1.363 orang (tidak termasuk pegawai rumah tahanan), yang terdiri dari: golongan I berjumlah 2 orang, golongan II berjumlah 301 orang, golongan III berjumlah 877 orang, dan golongan IV berjumlah 183 orang. Sebanyak 848 orang laki-laki dan 515 perempuan.

2.7. Perindustrian

1. Industri Kecil

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, jumlah usaha industri kecil yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2004 tercatat sebanyak 17.936 usaha dengan jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah 66.253 Orang. Biaya produksi yang diperlukan untuk industrialisasi pada tahun

2004 sebesar Rp. 223.047.850,00 dengan nilai output yang dihasilkan sebesar Rp. 318.321.410,00.

TABEL 2.9.

**Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Biaya Produksi dan Nilai Output
Sektor Industri Kecil di Kabupaten Bantul
Tahun 2004**

Sektor Industri	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja	Biaya produksi	Nilai Output
Pengolahan pangan	7.631	23.740	100.886.100	120.640.160
Sandang dan Kulit	682	4.108	9.560.740	24.418.480
Kimia dan bahan Bangunan	2.633	17.786	89.586.630	129.792.350
Kerajinan dan Umum	6.151	18.830	18.705.700	37.371.700
Logam dan Jasa	839	1.789	4.306.680	6.098.720
Jumlah	17.936	66.253	223.047.850	318.321.410

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul

2. Industri Besar/Sedang

Jumlah industri besar atau sedang yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2004 menurut hasil survei Industri Besar/Sedang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tercatat sebanyak 140 unit usaha yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Bantul, kecuali Kecamatan Sanden dan Kretek. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri tersebut sebanyak 15.757 orang.

TABEL 2.10.

**Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar atau Sedang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul
Tahun 2004**

Kecamatan	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja
Srandakan	3	71
Sanden	-	-
Kretek	-	-
Pundong	2	63
Bambanglipuro	1	33
Pandak	3	79
Bantul	10	1.554
Jetis	3	129
Imogiri	1	20
Dlingo	2	114
Pleret	6	218
Piyungan	7	812
Banguntapan	19	2.336
Sewon	49	5.854
Kasih	25	3.851
Pajangan	3	129
Sedayu	6	494
Jumlah	140	15.757

Sumber : Bantul dalam Angka 2004

2.8. Perekonomian

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap

penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku tahun 2004 mencapai 3,07 trilyun rupiah, atau naik sebesar 10,19 persen dibandingkan tahun 2002 sebesar 2,78 trilyun rupiah. PDRB Kabupaten Bantul tahun 2003 atas harga konstan tahun 1993 mencapai 0,94 trilyun rupiah, atau naik sebesar 4,03 persen dibandingkan dengan PDRB tahun 2003, sebesar 0,90 trilyun rupiah. Selain itu PDRB perkapita tahun 2004 juga mengalami peningkatan menjadi 3,795 juta rupiah.

Sektor pertanian masih menjadi andalan utama di daerah ini. Di kabupaten yang seluas 506,85 Km² yang dipadati penduduk sebanyak 777.748 jiwa (sesuai sensus penduduk 2000), sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian. Luas areal pertanian mencapai 16.596 hektar lahan sawah dan 28.671 hektar lahan kering. Tahun 2000 daerah ini menghasilkan 139.988 ton padi dari 26.711 hektar luas panennya. Sektor pertanian telah menjadi kontributor terbesar bagi kegiatan ekonomi Bantul. Tiap tahun sektor ini rata-rata menyumbang sekitar 24 persen, bahkan terjadi peningkatan di tahun 2001 menjadi 29,65 persen.

TABEL 2.11.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
Kabupaten Bantul
2000 – 2004 (Juta rupiah)**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	177.141	183.528	189.761	193.101	193.101
Pertambangan dan Penggalian	9.847	10.086	11.186	11.768	11.768
Industri Pengolahan	122.463	129.639	130.669	134.585	134.585
Listrik, Gas, dan Air Bersih	3.955	3.991	4.555	4.899	4.899
Bangunan	83.455	85.993	87.776	89.669	89.669
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	134.622	139.564	147.331	155.837	155.837
Angkutan dan Komunikasi	69.602	69.996	71.152	73.018	73.018
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	55.272	52.551	55.306	60.750	60.750
Jasa-Jasa	164.254	170.370	174.234	179.306	179.306
PDRB	820.611	845.718	871.970	903.932	940.364

Sumber: Bantul dalam Angka 2004

Sedangkan Realisasi penerimaan Kabupaten Bantul tahun 2004 sebesar Rp 436.016,303 juta yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 32.882,358 juta, Dana perimbangan sebesar Rp 326.269,037 juta dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp Rp 30.242,592 juta. Sedangkan total pengeluaran tahun 2004 tercatat sebesar Rp 421.692,042 Juta.

Tabel. 2.12.
**Rekapitulasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
 Tahun 2004**

Uraian	Nilai (Rp)
A. Pendapatan dan Penerimaan	436.016.303.436,15
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32.882.358.490,40
a. Pajak Daerah	6.600.583.794
b. Retribusi Daerah	18.489.365.638
c. Bagian Laba Usaha Daerah	3.467.226.010,72
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.325.183.047,68
2. Dana Perimbangan	326.269.036.657
a. Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	17.112.676.886
b. Dana Alokasi Umum	292.700.000.000
c. Dana Alokasi Khusus	1.000.000.000
d. Dana Perimbangan dari Propinsi	15.456.359.771
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah	46.622.316.657,75
a. Sisa lebih perhitungan tahun lalu	22.208.608.010,75
b. Tranfer ke dana cadangan	-
c. Penerimaan pinjama dan obligasi	-
d. Penjualan aset daerah yang dipisahkan	-
e. Uang kas dan perhitungan	24.413.708.647
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.242.591.631
B. Belanja + Pemerintah Daerah	421.692.041.639,21
1. Aparatur Daerah	107.292.124.620,95
a. Belanja Administrasi Umum	71.852.874.926,15
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	27.100.422.619,80
c. Belanja Modal	8.338.827.075
2. Pelayanan Publik	281.985.505.914,24
a. Belanja Administrasi Umum	182.953.673.530
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	21.975.375.208,95
c. Belanja Modal	28.599.217.853,29
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.752.466.021
e. Belanja tidak Terduga	2.704.773.301
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.414.411.104,02
a. Transfer Dana Cadangan	-
b. Penyertaan Modal	7.208.123.655,76
c. Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	798.791.331,26
d. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan	-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	24.407.496.117

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

2.9. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat mengetahui sumber PAD mana yang potensial dan mana yang kurang potensial. Setelah mengetahuinya, pemerintah daerah diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali lebih lanjut sumber tersebut, sedangkan PAD yang kurang potensial, pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dan mengkaji lebih lanjut mengapa penerimaan pada pos atau sumber tersebut rendah, apakah karena obyeknya yang terbatas atau adanya kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penerimaan PAD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2004 didominasi oleh penerimaan dari retribusi daerah dan Pajak daerah. Selama periode tersebut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2001 mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya perubahan penghitungan tahun, yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Akibat dari perubahan tersebut, jumlah bulan pada tahun anggaran 2001 adalah sembilan bulan, sehingga tidak sama dengan tahun anggaran lainnya yang jumlahnya 12 bulan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 2.13.

TABEL 2.13.

**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004**

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD	Pertumbuhan (%)
2000/2001	8.011.806.408,58	-
2001	7.648.309.737,28	-4,53
2002	14.073.123.545,58	84,00
2003	22.425.146.059,70	59,34
2004	32.882.358.490,40	46,63

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul Tahun 2004

2.10. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten bantul yang memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Retribusi Daerah menduduki peringkat pertama sebagai penunjang pendapatan asli daerah.

Dari tabel 2.13 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2002 dengan pertumbuhan sebesar 89,98 persen. Sedangkan pada tahun 2001 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar 9,24 persen.

TABEL 2.14.

**Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004**

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah	Pertumbuhan (%)
2000/2001	4.910.777.928	-
2001	4.456.880.414	-9,24
2002	8.467.347.433	89,98
2003	12.162.662.721	43,64
2004	18.489.365.638	52,01

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul Tahun 2004

2.11. Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah yang penerimaannya sangat mendukung PAD. Di Kabupaten Bantul, kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah cukup tinggi, walaupun kontribusi tertinggi pada tahun 2001 dan tahun 2002 diberikan oleh retribusi tempat rekreasi dan olahraga sedangkan pada tahun 2003 dan 2004 diberikan oleh retribusi pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, penerimaan retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 44,43 % dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2003 meningkat sebesar 6,36 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2004 meningkat sebesar 9,4 % dari tahun sebelumnya

TABEL 2.15.

**A. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 2000 – 2004**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)
2000	689.937.950
2001	574.724.340
2002	830.073.960
2003	882.883.410
2004	965.943.135

Sumber: Dipenda Kabupaten Bantul

**2.12. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan serta Besarnya Tarif Retribusi
Pasar di Kabupaten Bantul**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas pasar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya yang dimaksud meliputi:

1. Biaya Investasi.
2. Biaya Penyusutan.
3. Biaya Kebersihan dan Keamanan.
4. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
5. Biaya Pengadaan Karcis.
6. Bunga Pinjaman.

struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran/arahan, Los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. Sedangkan lokasi dimaksudkan untuk menentukan kelas pasar.

TABEL 2.16.

Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif
Pasar Kelas I	a. Los	Rp 125,00/M ² /hari
	b. Kios	Rp 175,00/m ² /hari
	c. Pelataran/arahan	Rp 40,00/m ² /hari
Pasar Kelas II	a. Los	Rp 100,00/m ² /hari
	b. Kios	Rp 150,00/m ² /hari
	c. Pelataran/arahan	Rp 30,00/m ² /hari
Pasar Kelas III	a. Los	Rp 75,00/m ² /hari
	b. Kios	Rp 125,00/m ² /hari
	c. Pelataran/arahan	Rp 20,00/m ² /hari
Pasar Hewan	a. ternak Besar (Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya)	Rp 3,000,00/ekor
	b. Ternak Kecil (Kambing, domba/biri-biri dan sejenisnya)	Rp 750,00/ekor

Sumber: Perda Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2000

TABEL 2.17.

Penggolongan Pasar Berdasarkan Kelas

A. Pasar Kelas I	1) Pasar Bantul 2) Pasar Niten 3) Pasar Piyungan 4) Pasar Panasan 5) Pasar Imogiri 6) Pasar Mangiran 7) Pasar Angkruksari 8) Pasar jejeran 9) Pasar Pleret 10)Pasar Barongan 11)pasar Sorobayan 12)Pasar Celep 13)Pasar Pundong
B. Pasar Kelas II	1) pasar Gumulan 2) pasar Sangkeh 3) Pasar Turi 4) Pasar Dlingo 5) Pasar Gatak 6) Pasar Koripan 7) Pasar Ngipik 8) Pasar Bendosari 9) Pasar Gesikan 10) Pasar Semampir
C. Pasar Kelas III	1) Pasar Sungpan 2) Pasr Grogol 3) Pasar Jlagran

Sumber: Perda Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2000

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

- Nurhinsyah (2002), dalam penelitiannya tentang potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Sumbawa, menyimpulkan bahwa:
 1. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa periode 1995/1996 – 2001 adalah 17,13 % per tahun. Pertumbuhan rata-rata tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah maupun pertumbuhan rata-rata PAD. Dampaknya adalah kontribusi retribusi pasar terhadap pertumbuhan retribusi daerah dan PAD relatif kecil.
 2. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 1995/1996 – 201 adalah rata-rata 9,32% per tahun terhadap penerimaan PAD. Penerimaan retribusi pasar merupakan penyumbang terbesar ke empat terhadap retribusi daerah.
 3. Target penerimaan retribusi pasar tahun 2001 adalah Rp. 316.464.000 atau 60,75% dari potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu Rp. 520.900.404. Hal ini disebabkan dalam penetapan target tidak dilakukan perhitungan potensi yang akurat, melainkan berdasarkan target dan realisasi tahun sebelumnya secara inkremental. Akibatnya, potensi retribusi pasar tidak tergali secara optimal.

4. Tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa periode 1995/1996 – 2001 masih rendah dan dari tahun ke tahun semakin menurun. Penyebab utama rendahnya efisiensi retribusi pasar adalah kenaikan honor dan upah pungut bagi petugas pasar tanpa disertai peningkatan kemampuan meningkatkan penerimaan yang proporsional. Akibatnya, penerimaan retribusi pasar sebagian besar digunakan untuk membayar honordan upah atau hanya sebagian kecil yang masuk ke kas daerah.
 5. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa periode 1995/1996 – 2001 berdasarkan kriteria yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri, tingkat efektivitas ini dikategorikan cukup efektif, yaitu berkisar diantara 60 % sampai 80 %. Efektivitas penerimaan retribusi pasar berdasarkan target adalah rata-rata 103,59 % per tahun. Hasil perhitungan berdasarkan target merupakan hasil yang *under estimated*. Akibatnya, terbuka peluang terjadi kebocoran dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD tidak maksimal.
- Supriyono (2001), dalam penelitiannya tentang Perhitungan Potensi, Efektivitas, Efisiensi Pertumbuhan dan Proyeksi Retribusi Pasar di Kabupaten Magetan Tahun 2000 menyatakan bahwa :
 1. Potensi retribusi pasar pada tahun anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 520.019.800 sedangkan realisasi penerimaannya adalah Rp

765.473.375. Dengan demikian selisih antara potensi dan realisasi masih cukup besar.

2. Tingkat efisiensi retribusi pasar rata-rata sebesar 50,80 %. Hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 100 dibutuhkan pengeluaran sebesar Rp 50,80. Adapun tingkat efektifitas pada tahun anggaran 1999/2000 adalah 50,16 % artinya tingkat efektifitasnya masih rendah.
 3. Pada lima tahun anggaran terakhir yakni 1995/1996 – 1999/2000 perkembangan dan laju pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Magetan rata-rata sebesar 15,74 %. Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 27,56 % dan terhadap PAD rata-rata 14,89 %.
 4. Proyeksi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magetan pada anggaran 2000 adalah Rp 866.180.616. Apabila dalam melaksanakan penarikan retribusi pasar dilakukan dengan sungguh-sungguh, pengawasan yang ketat dan motivasi yang tinggi dari para juru tagih dan kelancaran setoran uang kas daerah maka realisasinya dimungkinkan akan meningkat pula.
- Yuni Kustowo (2001), meneliti tentang potensi, efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di kabupaten Cilacap. Ia menyimpulkan bahwa:
 1. Target tahun 2002 adalah Sebesar Rp 1.601.626.810 atau 87,6 % dari potensi retribusi adalah sebesar Rp 1.846.597.205 sehingga target yang ditetapkan sebesar 86,7 % dari potensinya.

2. Perbandingan antara jumlah biaya pemungutan dengan penerimaan retribusi pasar selama empat tahun anggaran (1996/1997-1999/2000) menunjukkan angka yang semakin menurun sedangkan tahun 2000 meningkat.
3. Efektivitas pemungutan rata-rata retribusi pasar adalah 100,6 % dari target, artinya tingkat efektivitas yang meningkat menandai adanya potensi pembayaran yang belum tergali.
4. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Cilacap selama lima tahun anggaran (1996/1997-1999/2000) berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pertahun yaitu sebesar 6,41 %.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Pendapatan Asli Daerah

4.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) di setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak berubah. Komponennya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan laba dari BUMD. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang "subur" untuk kepentingan nasional.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan "kreativitas baru" untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah. Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, maupun investor lokal, maupun asing tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dari

pusat. Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab peran pemda dalam perekonomian daerah cenderung akan semakin menurun, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah fasilitator.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan suatu Negara pada hakikatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara tegas dan jelas.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah

dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

4.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan pasal 79 UU nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 3, 4, 5 dan pasal 6 UU nomor 25 Tahun 1999, sumber pendapatan daerah terdiri atas sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah (*mardiasmo, 2002, 98*).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (*Suparmoko, 2001, 85*).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan darurat.

4.2. Retribusi Daerah

4.2.1. Definisi Retribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang dapat digunakan sebagai referensi, antara lain :

1. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (*M. Suparmoko, 2002, 85*).
2. Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara dimana bisa dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (*M. Suparmoko, 1987, 94*).
3. Retribusi adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik (*Soetrisno PH, 1982, 202*).
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung (*The Liang Gie, 1968, 78*).
5. Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai pengganti (kerugian) dienssten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan dienssten itu (*Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1948*).

6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena masyarakat memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah (*UU darurat No. 12 tahun 1957 pasal 2 ayat 1*).
7. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (*Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001*

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

Menurut Agus Salim Nasution (1986), di dalam pasal 5 peraturan umum retribusi daerah disebutkan bahwa pengenaan retribusi daerah harus memenuhi azas-azas sebagai berikut :

1. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang keluar maupun ke dalam daerah. Ketentuan ini maksudnya bahwa pungutan retribusi jangan sampai memperberat biaya barang yang akan masuk atau keluar dari daerah pungutan retribusi.
2. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan agama.

4.2.2. Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah yaitu meliputi :

1. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. *Wajib Retribusi* adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. *Jasa Umum* adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi.
10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. *Penyidikan tindak pidana* dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

4.2.3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Yang dimaksud dengan pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan-perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, dan ruangan/tempat umum.

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil.

Yang dimaksud dengan akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian.

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Yang termasuk dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi penguburan/pemakaman, Pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Yang dimaksud dengan pelayanan parkir di tepi umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

- f. Retribusi Pelayanan Pasar.

Yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Yaitu pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik pemerintah daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Yang dimaksud dengan pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta.

c. Retribusi Terminal.

Yang dimaksud dengan pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pelayanan tempat khusus parkir adalah tempat yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Yang dimaksud dengan pelayanan penginapan/ pasanggrahan/ vila adalah pelayanan penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi Penyedotan Kakus.

Yang dimaksud dengan pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan Kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pada tempat pelabuhan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair/air limbah.

Yang dimaksud dengan Pengolahan Limbah Cair/air limbah adalah Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Yang dimaksud dengan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pelayanan izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Termasuk didalamnya kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di lingkungan di wilayah kekuasaan pemerintah daerah.

c. Retribusi Izin Gangguan.

Izin gangguan merupakan pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

d. Retribusi Izin Trayek.

Izin trayek merupakan pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Menurut Deddy Supriyadi dan Dadang Sholihin (2001), rinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

4.2.4. Obyek Retribusi Daerah

Obyek retribusi daerah terdiri dari:

1. Jasa Umum

Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha

Jasa Usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Perizinan tertentu

Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

4.2.5. Subyek Retribusi Daerah

Subyek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

4.2.6. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah

Kinerja suatu daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan daerah dalam prestasi kerjanya. Dengan demikian, untuk menilai potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi yang selanjutnya disebut dengan Retribusi Daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dapat digunakan untuk menilai kecukupan, elastisitas, keadilan, tingkat tarif atas balas layanan, kesepakatan fasilitas serta kemampuan administrasi di daerah tersebut.

Kesit Bambang (2003) menyebutkan bahwa kriteria kinerja pungutan Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Penilaian : Kecukupan dan Elastisitas

Beberapa ketentuan terhadap retribusi bahwa elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, umumnya dipengaruhi oleh permintaan atau konsumsi terhadap pelayanan di dalam suatu pertumbuhan. Tetapi responnya juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan penduduk, khususnya di sektor-sektor besar di perkotaan, yang sering dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi. Retribusi-retribusi cenderung tidak responsif kepada inflasi, namun hampir selalu didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang tetap dan suatu wewenang mengambil keputusan untuk meningkatkan apabila terjadi biaya-biaya naik.

2. Penilaian : Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan utama yaitu :

- a. Penilaian yang jatuh pada konsumsi, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada tingkat pendapatan.
- b. Subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan masyarakat miskin.
- c. Karena biaya modal tidak disesuaikan dengan memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatnya tersebut, banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan biaya unit.

3. Penilaian : Kemampuan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Ada beberapa masalah dan prosedur dalam praktek pemungutan retribusi yaitu masalah teknis yang meliputi :

- a. Masalah yang menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi, karena mencantumkan pembebanan sanksi adalah penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Praktek mengefisienkan administrasi retribusi adalah memperkirakan pendapatan apa yang harus diterima dan kemudian menggunakan target penerimaan dari pemungutan.
- b. Mensubkontrakkan retribusi kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan bulat secara kompetitif.

- c. Meminta sekelompok lingkungan kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya bersama-sama kepada pihak pemberi pelayanan pelaksanaan retribusi daerah dan harus mempertimbangkan kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan.

4. Penilaian : Kesepakatan Politis

Sebagian besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Sepanjang mereka langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu termasuk elemen pemilihan dimana retribusi dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak. Namun demikian, tingkat atau besarnya retribusi lebih sensitif secara politik. Sebagian besar retribusi harus dibayar dari pendapatan sendiri dan dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari oleh sebagian masyarakat. Kemungkinan lain, peningkatan retribusi karena peningkatan biaya mungkin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi dan selama biaya modal dapat konstan, maka akan meningkatkan biaya per unit. Hubungan langsung antara konsumsi dan retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis.

5. Penilaian : Retribusi oleh Pemerintah Daerah

Sejauh ini, pembahasan belum difokuskan khususnya pada retribusi oleh Pemerintah Daerah, selama masih terdapat perbedaan yang kecilpun, dalam praktek dan pengalaman Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah. Banyak pelayanan yang bersifat pembayaran retribusi langsung yang sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kedekatan relatif antara

badan-badan daerah dengan orang-orang yang berhak memilih akan menambah ketidakmauan mereka untuk menaikkan tarif.

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya merupakan alasan yang kuat untuk membebankan biaya langsung pada konsumen. Retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan yang masih ada unsur keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang sesuai. Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tinggi antara lain, penerimaan lebih rendah dari tingkat yang dibutuhkan untuk pengoperasian pelayanan secara efektif, khususnya pada saat inflasi, karena politik enggan untuk meningkatkan tarif atau mengenakan sanksi. Hubungan antara konsumsi, biaya dan sifat langsung dari pembayaran akan mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, tetapi sensitivitas konsekuensinya dapat merusak kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dipungut retribusi.

Untuk menganalisis kinerja secara kuantitatif, dapat digunakan perhitungan-perhitungan dengan menganalisa data yang ada. Analisa kuantitatif yang dimaksud antara lain :

1. Kontribusi Retribusi

Fungsi perhitungan kontribusi retribusi adalah untuk mengetahui peran atau nilai tambah retribusi itu sendiri terhadap sesuatu yang menjadi ukuran dimana didalamnya terdapat retribusi tersebut. Sehingga dapat diketahui

seberapa besar peran/kontribusi retribusi. Perhitungan kontribusi ini menggunakan perbandingan antara dua data yang saling berhubungan. Misalnya ; kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah, atau terhadap PAD, dan sebagainya. Penilaian kontribusi ini berdasarkan perhitungan, semakin tinggi persentase kontribusi maka kinerjanya akan semakin baik pula. Nilai kontribusi disajikan dalam persen.

2. Efektifitas Retribusi

Efektifitas adalah sebagai salah satu indikator kinerja bagi pelaku pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektifitas retribusi dihitung dengan berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen perhitungan realisasi penerimaan retribusi. Ada beberapa tingkatan persentase efektifitas kinerja, yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17*):

TABEL 4.1.

Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas Retribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
70 % - 80 %	Kurang Efektif
Di bawah dari 60 %	Tidak Efektif

***Ket: Depdagri, Kep Mendagri No. 690.900.327 tahun 1997
tentang pedoman Penelitian dan kinerja keuangan***

3. Efisiensi Retribusi

Efisiensi retribusi menggambarkan bagaimana efisiensi dari biaya pemungutan dan realisasi penerimaan retribusi. Hasil dari perhitungan ini diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penerimaan retribusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau biaya pemungutan berdasarkan jumlah realisasi retribusi. Hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh menunjukkan persentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila semakin besar berarti semakin tidak efisien. Persentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17*):

TABEL 4.2.

Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi Retribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
70 % - 80 %	Efisien
Di bawah dari 60 %	Sangat Efisien

Ket: Depdagri, Kep Mendagri No. 690.900.327 tahun 1997 tentang pedoman Penelitian dan kinerja keuangan

4. Potensi Retribusi

Fungsi perhitungan dari potensi retribusi adalah untuk mengetahui apakah target pemungutan retribusi telah dilaksanakan dengan maksimal dan bisa melampaui dari target. Potensi retribusi dipengaruhi oleh pengguna jasa, luas lahan, dan tarif masing-masing retribusi. Potensi retribusi harus terus ditingkatkan untuk mendapatkan target yang diinginkan.

4.3. Pengertian Pasar

Pengertian pasar dalam arti sederhana adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya antara permintaan dan penawaran (*Lincoln Arsyad, 1991, 23 – 24*).

Adapun definisi pasar adalah :

1. Pasar adalah segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan DPRD, dimana pedagang-pedagang berkumpul menjual barang dagangannya.
2. Pasar adalah tempat bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha mempertunjukkan, memperjualbelikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.
3. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lain yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Kategori fungsi pasar yang didasarkan pada besarnya pasar yang ditentukan oleh tingkat keramaian, besarnya retribusi, jangkauan pelayanan, besarnya fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, keragaman komoditas, jumlah hari pasar dan sejenisnya dapat disebutkan dalam lima golongan kelas pasar (menurut UU No. 3 Tahun 1992, 4), yaitu :

1. Pasar kelas 1 (pasar regional)

Pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan memberikan pelayanan antar kota dan atau daerah belakang/pendukung dengan luas minimal 35.000 m² yang berlokasi di pinggiran kota atau perkotaan sekitar jalan arteri sekunder atau kolektor primer.

2. Pasar kelas 2 (pasar kota)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan berfungsi memberikan pelayanan dalam kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 m² yang berlokasi di pusat kota atau perkotaan di kawasan perdagangan/jasa.

3. Pasar kelas 3 (pasar wilayah)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 4.000 m² yang berlokasi di wilayah bagian kota dalam kawasan perdagangan/jasa.

4. Pasar kelas 4 (pasar lingkungan)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang terutama di dalam bangunan berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lingkungan dengan luas lahan minimal 500 m² yang berlokasi di lingkungan.

5. Pasar kelas 5 (pasar warungan)

Pasar tanpa komponen bangunan, sistem arus barang berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lokal yaitu perumahan atau desa dengan luas lahan kurang dari 500 m² dan lokasinya tersebar.

4.4. Retribusi Pasar

4.4.1. Pengertian Retribusi Pasar

Reribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar. Retribusi pasar untuk setiap daerah pemungutan, ketentuan dan peraturannya dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Menurut Adolf Wagner (1973), Retribusi pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi Negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan milik pemerintah. Pedagang membayar retribusi kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan.
2. Menurut cara penentuan jumlah pungutan, retribusi pasar merupakan retribusi variabel, jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, golongan dagangan, luas toko, petak atau gudang atau los yang digunakan serta tempat berdagang.
3. Menurut cara pembayarannya, retribusi pasar termasuk termasuk retribusi kontan, pemakaian jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran tiap

hari, sedangkan jasa kios melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem harian atau mingguan.

4.4.2. Obyek Retribusi Pasar

Yang dimaksud dengan obyek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ pelataran, los atau kios dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan yang tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Obyek retribusi pasar terdiri dari :

1. Komponen utama, terdiri atas :
 - a. Lantai dasaran pada lahan.
 - b. Lantai dasaran pada toko/kios.
 - c. Lantai dasaran pada los.
 - d. Lantai dasaran luar los.
 - e. Lantai dasaran luar pasar.
 - f. Gudang.
 - g. Kandang hewan.
2. Komponen Penunjang, terdiri atas :
 - a. Kamar mandi/WC.
 - b. Tempat parkir.
 - c. Tempat bongkar muat.
 - d. Kerekan barang.

3. Komponen pendukung seperti tempat penitipan anak dan tempat pelayanan kesehatan.

Istilah-istilah yang ada kaitannya dengan retribusi pasar, antara lain:

1. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding
2. Kios adalah Bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
3. Pelataran adalah Tempat di dalam dan di luar pasar dalam radius tertentu yang tidak didirikan bangunan kios dan atau los yang merupakan daerah pengaruh pasar.
4. Izin penggunaan kios dan atau los adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios dan atau los secara menetap.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
6. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar

4.4.3. Subyek Retribusi Pasar

Subyek retribusi pasar adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, kios, los

dan halaman/ pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

4.4.4. Penagihan Retribusi Pasar

Penagihan retribusi pasar ini diatur dalam peraturan retribusi daerah, hal ini dimaksudkan agar para pembayar retribusi menyadari akan hak dan kewajibannya. Agar penarikan tagihan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target maka baik pihak penagih atau pihak tertagih harus bisa melaksanakan hak serta kewajibannya dengan benar. Menurut *Andik Fajar Tjahyono (1996)* penagihan retribusi meliputi :

1. Yang kena retribusi disodorkan daftar isian agar pengenaan retribusi sesuai dengan jumlah yang mereka memang harus bayarkan
2. Yang kena retribusi harus memenuhi kewajibannya bila sesuai dengan yang mereka harus bayarkan

Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat diadakan ancaman hukuman dengan hukuman selamamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Sebelum ancaman tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan pendahuluan yang meliputi :

1. Peringatan.
2. Teguran.
3. Denda atau tambahan pembayaran.
4. Penyitaan.

Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi pada waktu memungut retribusi, yaitu:

1. Bahwa pada umumnya jasa yang dibayar dengan retribusi tersebut bermanfaat baik individu maupun masyarakat. Apabila keuntungan individu itu relatif lebih besar maka dipandang sudut pembagian beban adalah adil. Sebaliknya apabila keuntungan relatif besar bagi masyarakat maka retribusi harus ditentukan relatif lebih rendah dan sebagian besar ongkos penyediaan negara yang bersangkutan harus dibiayai oleh perpajakan.
2. Pemungutan retribusi dibenarkan selama kerugian yang ditimbulkan oleh pembatasan penggunaan jasa negara itu lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak. Apabila jasa itu lebih bermanfaat bagi masyarakat maka lebih besar juga kegunaan penurunan retribusi.

4.4.5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Dasar hukum dalam mengadakan pemungutan retribusi sebagai sumber keuangan daerah, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah pemungut, peraturan daerah tersebut dibuat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Oleh karena itu tiap daerah pemungutan terdapat peraturan yang mengatur pemungutan retribusi pasar.

4.4.6. Hak, Kewajiban, dan Larangan Retribusi Pasar

Wajib retribusi pasar adalah para pedagang dan pengunjung pasar yang karena hak dan kewajibannya memanfaatkan fasilitas dan jasa milik pemerintah daerah di dalam dan di kawasan pasar. Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan wajib retribusi pasar adalah:

1. Untuk menjadi pedagang pasar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat surat permohonan dan surat pernyataan kesanggupan untuk berdagang di dalam atau di kawasan pasar yang ditujukan kepada Kepala Daerah.
 - b. Membayar biaya administrasi ongkos ganti cetak dan biaya pelimpahan hak dan penggunaan komponen utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan menjadi pedagang pasar oleh Kepala Daerah
3. Penetapan tersebut dibuktikan dengan diterbitkan kartu bukti pedagang pasar oleh Kepala Daerah.
4. Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna kartu bukti pedagang pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Pemegang kartu bukti pedagang pasar adalah pedagang pasar yang namanya tercantum dalam kartu bukti pedagang pasar.
6. Pemegang kartu bukti pedagang pasar mempunyai hak:
 - a. Menggunakan komponen utama berupa lantai dasaran dengan keterangan:
 - a) Lantai dasaran pada lahan sekurang-kurangnya 2 M² dan seluas-luasnya 3 M²
 - b) Toko petak/kios unit
 - c) Lantai dasaran dalam los sekurang-kurangnya 2 M² dan seluas-luasnya 16 M²
 - d) Lantai dasaran luas los seluas-luasnya 2 M²
 - e) Gudang 1 unit
 - f) Kandang hewan 1 unit
 - b. Menggunakan komponen penunjang
 - c. Menggunakan komponen pendukung
7. Pemegang kartu bukti pedagang pasar mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar retribusi secara harian atas penggunaan komponen utama, penunjang, pendukung.

- b. Membayar administrasi dan ongkos cetak serta biaya dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penggunaan komponen utama sesuai dengan barang dagangan yang tercantum dalam kartu bukti pedagang pasar dan pembayaran dilakukan secara harian.
 - d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. Pengunjung pasar mempunyai hak:
- a. Menggunakan komponen penunjang
 - b. Menggunakan komponen pendukung
9. Pengunjung pasar mempunyai kewajiban:
- a. Membayar retribusi atas penggunaan hak tersebut.
 - b. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Larangan bagi para wajib retribusi pasar

Pemegang kartu bukti pedagang pasar tidak boleh mengalihkan hak dan penggunaannya dan memanfaatkan komponen utama kecuali dengan izin Kepala Daerah. Pemegang izin dan pedagang di pelataran dilarang:

1. Mengubah, menambah dan mengurangi bangunan
2. Menggunakan kios, los atau pelataran untuk kegiatan lain, selain yang tersebut dalam surat izin atau surat pemberitahuan
3. Menggunakan kios, los, atau pelataran untuk usaha/berdagang barang-barang yang membahayakan bangunan atau mengganggu ketertiban umum.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat menggambarkan keadaan atau status fenomena retribusi pasar yang menghubungkan dengan retribusi pasar.

5.2. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5.3. Lokasi penelitian

Daerah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Bantul dengan obyek penelitian adalah retribusi pemungutan pasar.

5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan dan pemeriksaan data dari catatan-catatan yang dipublikasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar, bagian perlengkapan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berdialog langsung dengan staf pemungutan retribusi pasar di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar yang merupakan Unit Kerja dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bantul mengenai pemungutan pasar.

5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat potensi, efektivitas, pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, 2001, IV-2)

a. Analisis Potensi Retribusi Pasar Umum

$$[(LKS \times JPK \times TR) + (LLS \times JPL \times TL) + (LLS \times JPA \times TR)] \times [\Sigma \text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12]$$

dimana :

LKS : Luas Kios yang Digunakan Untuk Berdagang Barang dan Jasa

JPK : Jumlah Pedagang di Kios

LLS : Luas Kios yang Digunakan Untuk Pedagang Barang dan Jasa

JPL : Jumlah Pedagang di Los

TR : Tarif Retribusi Pasar

JPA : Jumlah Pedagang Arahkan

b. Analisis Potensi Retribusi Pasar Hewan

$$[(\text{JHB} \times \text{TR}) + (\text{JHK} \times \text{TR})] \times [\Sigma \text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12]$$

dimana:

JHB : Jumlah Hewan Besar yang Masuk kedalam Pasar Hewan

JHK : Jumlah Hewan Kecil yang Masuk kedalam Pasar Hewan

TR : Tarif Retribusi Pasar

c. Analisis Efektivitas (Sidik, 1994, 76).

Efektivitas mengukur hubungan antara hasil penerimaan dari retribusi pasar terhadap target retribusi pasar.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100 \%$$

Semakin besar nilai efektivitasnya berarti semakin besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar.

d. Analisis Tingkat Pertumbuhan

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana:

ΔX = Laju pertumbuhan.

X_t = Realisasi penerimaan retribusi pasar tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan tahun lalu.

BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Potensi Retribusi Pasar

Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis potensi retribusi pasar umum dan analisis potensi retribusi pasar hewan. Setelah kedua potensi pasar tersebut diolah, baru dapat dilihat hasilnya berapa besar kedua potensi pasar tersebut.

a. Potensi Retribusi Pasar Umum.

Untuk menghitung potensi ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian, pertama antara jumlah kios, pedagang kios, tarif kios. Yang kedua adalah hasil kali antara jumlah los, pedagang los, tarif los dan yang ketiga adalah jumlah arahan, pedagang arahan, tarif arahan kemudian dikalikan dengan jumlah aktivitas pasar sebulan dikalikan dengan 12.

Hasil perhitungan potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

**Potensi Retribusi Pasar umum dan Target penerimaan
Retribusi Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 2000-2004**

Tahun	Potensi Retribusi Pasar Umum	Target penerimaan Retribusi Pasar
2000	Rp. 1.078.737.300	Rp. 675.000.000,00
2001	Rp. 1.309.929.913	Rp. 550.000.000,00
2002	Rp. 1.493.790.300	Rp. 791.176.000,00
2003	Rp. 2.113.748.100	Rp. 957.067.220,00
2004	Rp.2.073.275.946	Rp. 957.069.180,00

Sumber: Data diolah

b. Potensi Retribusi Pasar Hewan.

Untuk menghitung potensi ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian, pertama antara jumlah hewan besar dengan tarif. Yang kedua adalah jumlah hewan kecil dengan tarif kemudian dikalikan dengan jumlah aktivitas pasar sebulan dikalikan dengan 12.

Hasil perhitungan potensi retribusi paasar hewan di Kabupaten Bantul tahhun 2000-2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Potensi Retribusi Pasar Hewan dan Target Penerimaan Retribusi
Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 2000 - 2004

Tahun	Potensi Retribusi Pasar Hewan	Target penerimaan Retribusi Pasar
2000	Rp.17.226.000	Rp. 675.000.000,00
2001	Rp.18.306.000	Rp. 550.000.000,00
2002	Rp.20.250.000	Rp. 791.176.000,00
2003	Rp.21.924.000	Rp. 957.067.220,00
2004	Rp.23.652.000	Rp. 957.069.180,00

Sumber: Data Diolah

Dari hasil analisa potensi retribusi pasar baik pasar umum maupun pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa potensi selama lima tahun rata-rata mengalami peningkatan. Tahun 2000 jumlah potensinya adalah Rp. 1.095.963.300. Ditahun 2001 mengalami peningkatan sebesar Rp. 232.272.613 menjadi Rp. 1.328.235.913. Demikian juga untuk tahun 2002 potensi retribusi pasar meningkat sebesar Rp. 185.804.387 menjadi Rp. 1.514.040.300, Pada tahun 2003 jumlah peningkatan potensinya merupakan paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun penelitian sebelumnya yaitu sebesar Rp.621.631.800 menjadi Rp. 2.135.672.100. Hal ini disebabkan adanya penambahan kios dan los di Pasar Bantul

dan Pasar Niten. Selain itu pemerintah melakukan renovasi pasar tradisional yang merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan PAD.

Tetapi di tahun 2004 jumlah potensi mengalami penurunan sebesar Rp. 38.744.154 sehingga menjadi Rp. 2.096.927.946. Penurunan ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang di Pasar Barongan akan kewajiban mereka membayar pungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dengan demikian potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 2000-2004 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga kondisi semacam ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial.

Tabel 5.3.

**Potensi dan Penerimaan Retribusi Pasar
di Kabupaten Bantul
(Pasar Umum dan Pasar Hewan)
Tahun 2000-2004**

Tahun	Total Potensi Retribusi Pasar	Target penerimaan Retribusi Pasar
2000	Rp. 1.095.963.300	Rp. 675.000.000,00
2001	Rp. 1.328.235.913	Rp. 550.000.000,00
2002	Rp. 1.514.040.300	Rp. 791.176.000,00
2003	Rp. 2.135.672.100	Rp. 957.067.220,00
2004	Rp. 2.096.927.946	Rp. 957.069.180,00

Sumber : Data diolah

6.2. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan cara atau target yang kemudian dikalikan dengan 100%.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100 \%$$

Tabel 5.4.

Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul 2000– 2004 (Dalam rupiah)

Tahun	Target Retribusi Pasar	Realisasi retribusi pasar	Efektivitas (%)
2000	675.000.000	689.937.000	102,21
2001	550.000.000	574.724.340	104,5
2002	791.176.000	830.073.960	104,92
2003	957.067.220	882.883.410	92,25
2004	957.069.180	965.943.135	100,93
Rata-rata			100,65

Sumber: Data diolah

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2000 – 2004 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul berkisar antara 92,25 % sampai dengan 104,92 %. Pada tahun 2000 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah sebesar 102,21 % dengan target yang direncanakan sebesar Rp 675.000.000,00 dan realisasi pemungutannya sebesar Rp. 689.937.950,00. Di tahun 2001 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar mengalami peningkatan menjadi 104,50 % dengan target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 550.000.000 dan retribusi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 574.724.340. Pada tahun 2002 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar juga mengalami kenaikan menjadi 104,92 %

dengan target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 791.176.000 dan retribusi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 830.073.960. Efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2002 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang paling efektif dari lima tahun penelitian. Pada tahun 2002 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar mengalami penurunan menjadi 92,25 % dengan target yang direncanakan adalah Rp. 957.067.220 dan retribusi pasar yang terealisasi adalah sebesar Rp. 882.883.410. Efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2003 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang terendah dari lima tahun penelitian. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2003, pemerintah Daerah setempat melaksanakan pembangunan pasar yaitu Pasar Angkrusari dan Pasar Jejeran. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan tersebut menyebabkan penerimaan retribusi pada Pasar Angkrusari dan Pasar Jejeran menjadi semakin berkurang, walaupun pemerintah telah menyediakan lokasi sementara untuk pedagang. Tingkat efektivitas yang terlalu rendah pada tahun 2003 juga disebabkan karena pemakai kios di Pasar Barongan tidak membayar retribusi kios sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pasar Barongan yang letaknya sangat terpencil dan kondisi pasar yang belum baik menyebabkan para pedagang merasa keberatan untuk membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sehingga berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, tarif retribusi kios untuk Pasar Barongan diturunkan.

Pada tahun 2004 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah sebesar 100,93 % dengan target yang direncanakan sebesar Rp. 957.069.180,00 dan retribusi pasar yang terealisasi adalah sebesar Rp. 965.943.135,00. Jika di rata-rata maka tingkat

efektivitas untuk lima tahun penelitian adalah sebesar 100,65 %. Berdasarkan pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah, maka tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar tahun 2000 – 2004 menunjukkan kriteria sangat efektif karena berada di interval lebih dari 100 %.

6.3. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar

Untuk melihat bagaimana perkembangan pendapatan dari retribusi pasar, sebelumnya harus melihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi pasar. Pertumbuhan dapat kita hitung dengan membandingkan antara realisasi pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk dapat melihat kecenderungan perkembangannya meningkat atau menurun. Berikut ini ditampilkan tabel laju pertumbuhan retribusi pasar Kabupaten Bantul tahun 2000 – 2004

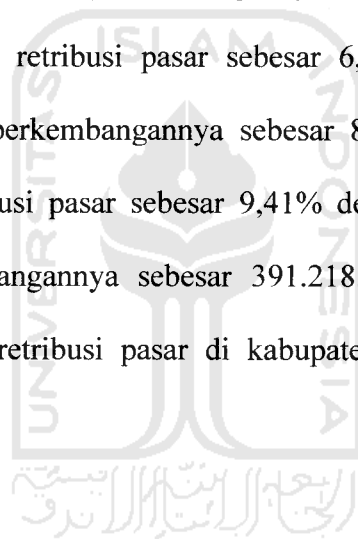
Tabel 5.5.

**Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
2000 – 2004
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Perkembangan	Pertumbuhan (%)
1999	635.041.543	-	-
2000	689.937.950	54.896.407	8,64
2001	574.724.340	255.349.620	-16,70
2002	830.073.960	52.809.450	44,43
2003	882.883.410	83.059.725	6,36
2004	965.943.135	391.218.795	9,41
Rata-rata			10,43

Sumber : Data diolah

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2000 – 2004 tingkat laju pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul berkisar 6,36% sampai dengan 44,43%. Pada tahun 2000 tingkat laju pertumbuhan retribusi pasar sebesar 8,64% dengan target realisasi sebesar 689.937.950 dan perkembangan 54.896.407. pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan retribusi pasar sebesar -16,70% dengan target realisasi sebesar 574.724.340 dan perkembangannya 255.349.620. pada tahun 2002 tingkat pertumbuhan retribusi pasar sebesar 44,43% dengan target realisasi sebesar 830.073.960 dan perkembangannya sebesar 52.809.450. pada tahun 2003 tingkat pertumbuhan retribusi pasar sebesar 6,36% dengan target realisasi sebesar 882.883.410 dan perkembangannya sebesar 83.059.725. pada tahun 2004 tingkat pertumbuhan retribusi pasar sebesar 9,41% dengan target realisasi sebesar 965.943.135 dan perkembangannya sebesar 391.218.795. jika di rata-rata maka tingkat laju pertumbuhan retribusi pasar di kabupaten bantul selama lima tahun penelitian sebesar 10,43%



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan tersebut yang telah dianalisa pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dengan demikian potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 2000-2004 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga kondisi semacam ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial.
2. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2002 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang paling efektif dari lima tahun penelitian sedangkan untuk tahun 2003 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang terendah. Tingkat efektivitas yang terlalu rendah disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembangunan pasar, yaitu Pasar Angkruksari dan Pasar Jejeran, selain itu perhitungan target Pasar Jodog yang terlalu besar serta disebabkan karena pemakai kios di Pasar Barongan tidak membayar retribusi kios sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan pada KepMendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah, maka tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Bantul tahun 2000

sampai dengan 2004 menunjukkan kriteria sangat efisien karena berada di interval 90 % - 100 %.

3. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 2000-2004 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,43% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar dapat dijadikan salah satu andalan yang potensial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan PAD yang khususnya disektor pasar meskipun kurang maksimal karena nilai rata-ratanya dibawah 50% per tahun.

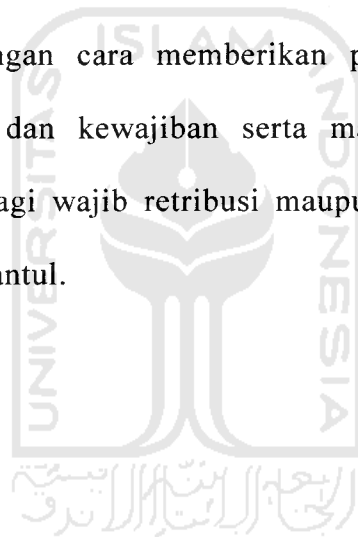
7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan pemungutan retribusi pasar, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan potensi retribusi pasar perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga setiap perubahan obyek retribusi dapat diantisipasi dan hasil perhitungan lebih akurat dan fluktual sesuai dengan kondisi nyata setiap pasar. Penetapan target retribusi pasar hendaknya didasarkan atas hasil analisis potensi retribusi pasar sehingga pungutan yang diterima benar-benar mencerminkan potensi yang ada.
2. untuk meningkatkan efektivitas penerimaan potensi retribusi pasar dapat dilakukan dengan penetapan target yang realistis dan menghindari penetapan target yang *under estimated*, melakukan

pengawasan yang cukup terhadap para juru pungut serta dengan memberi pelayanan pasar sehingga kewajiban membayar retribusi pasar terpenuhi.

3. Untuk meningkatkan pertumbuhan retribusi pasar perlu diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya.
4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib retribusi pasar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran membayar retribusi pasar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, misalnya dengan cara memberikan penyuluhan secara intensif tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.



DAFTAR PUSTAKA

- Baratah, Deddy, S. dan Solihin, Dadang (2001), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul (2003), *Bantul dalam Angka*, Percetakan BPS, Yogyakarta.
- Kustowo, Y. (2001), *Potensi, dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 1996/1997 – 1999/2000*, Tesis S-2 (Tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2003), *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Mi'raz, I, Dudi (2002), *Potensi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD di Kota Depok*, Tesis S-2 (Tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nurhinsyah (2002), *Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sumbawa*, Tesis S-2 (Tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Prakoso, Bambang, K. (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Pramundita, Wirawan, B. (2005), *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1999 – 2003*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII (2005), *Pedoman Penulisan Skripsi*, UII Press, Yogyakarta.

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM dengan Bag. Proyek Pemberdayaan Potensi Daerah BPKD Kab. Kulon Progo (2001), *Laporan Akhir: Penghitungan Potensi PAD (Retribusi Pasar) Kab. Kulon Progo*, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta.

Samudra, Azhari, A. (1995), *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Gramedia, Jakarta.

Saragih, Panglima, J. (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*, Galia Indonesia, Jakarta.

Suparmoko, M. (2001), *Ekonomi Publik: Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Supriyono (2001), *Perhitungan Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Pertumbuhan dan Proyeksi Retribusi Pasar Di Kabupaten Magetan Tahun 2000*, Tesis S-2 (Tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Syukardi (2001), *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

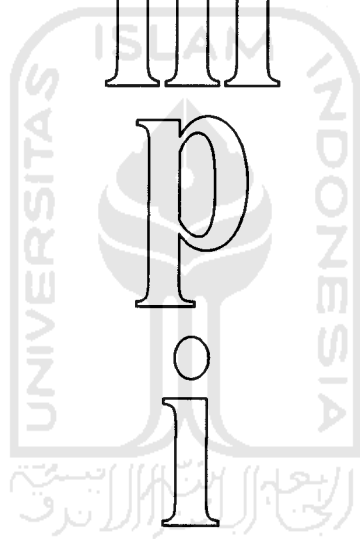
Tim Litbang Kompas (2001), *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid I*, Kompas, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



L a m p i r a n



Lampiran I

Jumlah Hari Pasaran

<i>Nama Pasar</i>	Jumlah Hari/ Bulan
Pasar Bantul	30
Pasar Niten	30
Pasar Jodog	30
Pasar Gesikan	30
Pasar Gatak	30
Pasar Semampir	30
Pasar Sungapan	30
Pasar Mangiran	30
Pasar Gumulan	30
Pasar Sorobayan	30
Pasar Koripan	30
Pasar Jragan	30
Pasar Imogiri	30
Pasar Dlingo	30
Pasar Tekik	30
Pasar Turi	30
Pasar Angkrusari	30
Pasar Celep	30
Pasar Sangkeh	30
Pasar Grogol	30
Pasar Jejeran	30
Pasar Pleret	30
Pasar Ngipik Lor	30
Pasar Piyungan	30
Pasar Panasan	30
Pasar Pundong	30
Pasar Bendosari	30
Pasar Barongan	30
Kios Palbapang	30

Sumber: Dipenda Bantul

Lampiran II

Tarif Retribusi Pasar Umum di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Tarif		
		Kios (Rp)	Los (Rp)	Arahan (Rp)
1	Pasar Bantul	175	125	40
2	Pasar Niten	175	125	40
3	Pasar Jodog	175	125	40
4	Pasar Gesikan	150	100	30
5	Pasar Gatak	150	100	30
6	Pasar Semampir	150	100	30
7	Pasar Sungapan	125	75	20
8	Pasar Mangiran	175	125	40
9	Pasar Gumulan	150	100	30
10	Pasar Sorobayan	175	125	40
11	Pasar Koripan	150	100	30
12	Pasar Jragan	125	75	20
13	Pasar Imogiri	175	125	40
14	Pasar Dlingo	150	100	30
15	Pasar Tekik	125	75	20
16	Pasar Turi	150	100	30
17	Pasar Angkrusari	175	125	40
18	Pasar Celep	175	125	40
19	Pasar Sangkeh	150	100	30
20	Pasar Grogol	125	75	20
21	Pasar Jejeran	175	125	40
22	Pasar Pleret	175	125	40
23	Pasar Ngipik Lor	150	100	30
24	Pasar Piyungan	175	125	40
25	Pasar Panasan	175	125	40
26	Pasar Pundong	175	125	40
27	Pasar Bendosari	150	100	30
28	Pasar Barongan	175	125	40
29	Kios Palbapang	175	125	40

Sumber: Dipenda Bantul

Lampiran III

Jumlah Hari Pasaran Pasar Hewan di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Jumlah Hari/bulan
1	Pasar hewan Pandak	6
2	Pasar hewan Imogiri	6

Sumber: Dipenda Bantul

Lampiran IV

Tarif Pasar Hewan di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Tarif	
		Hewan Besar	Hewan Kecil
1	Pasar hewan Pandak	3000	750
2	Pasar hewan Imogiri	3000	750

Sumber: Perda Kab. Bantul No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi pasar

Sumber: Dipenda Bantul

Lampiran V

Efektivitas Retribusi Pasar Tahun 2000– 2004

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Efektivitas
2000	689.937.000	675.000.000	102,21
2001	574.724.340	550.000.000	104,50
2002	830.073.960	791.176.000	104,92
2003	882.883.410	957.067.220	92,25
2004	965.943.135	957.069.180	100,93
	Rata-rata		100,65

Sumber: Data Diolah

Lampiran VI

Upah Pungut Retribusi Pasar Tahun 2000 - 2004

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Upah Pungut (5% x Realisasi Retribusi Pasar)
2000	689.937.950	34.496.897,5
2001	574.724.340	28.736.217
2002	836.073.960	41.803.698
2003	882.883.410	44.144.170,5
2004	965.943.135	48.297.156,75

Sumber: Data Diolah

Sumber: Data Diolah

Lampiran VII

Tingkat Pertumbuhan Retribusi pasar Tahun 2000 – 2004

Tahun	Realisasi Pertumbuhan	Perkembangan	Tingkat Pertumbuhan (%)
1999	635.041.543	-	-
2000	689.937.950	54.896.407	8,64
2001	574.724.340	255.349.620	- 16,70
2002	830.073.960	52.809.450	44,43
2003	882.883.410	83.059.725	6,36
2004	965.943.135	391.218.795	9,41
Total	4.578.604.338		10,43

Sumber: Data Diolah

Lampiran VIII

Jumlah Pedagang di Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 2000 - 2004

Nama Pasar	2000			2001			2002			2003			2004		
	Los	Arahan	Kios	Los	Arahan	Kios	Los	Arahan	Kios	Los	Arahan	Kios	Los	Arahan	Kios
Pasar Bantul	576	143	144	43	171	132	659	164	165	725	180	181	1127	1127	382
Pasar Niten	375	146	9	77	119	8	429	167	10	472	184	11	996	996	23
Pasar Jodog	120	86	0	45	38	0	138	98	0	151	108	0	319	319	0
Pasar Gesikan	76	29	0	15	24	0	87	33	0	95	36	0	201	201	0
Pasar Gatak	140	110	0	58	44	0	160	125	0	176	138	0	371	371	0
Pasar Semampir	45	74	0	39	14	0	52	84	0	57	93	0	120	120	0
Pasar Sungapan	12	36	0	19	4	0	14	41	0	15	45	0	32	32	0
Pasar Mangiran	150	71	44	38	47	43	172	81	50	189	89	55	399	399	116
Pasar Gumulan	37	43	0	23	11	0	42	49	0	46	54	0	97	97	0
Pasar Sorobayan	129	101	0	53	41	0	147	115	0	162	127	0	342	342	0
Pasar Koripan	9	9	0	5	3	0	10	10	0	11	11	0	23	23	0
Pasar Jragan	14	7	0	4	5	0	16	8	0	18	9	0	38	38	0
Pasar Imogiri	354	144	30	76	112	30	405	165	34	445	181	38	939	939	80
Pasar Dlingo	30	26	8	14	10	7	34	30	9	38	33	10	80	80	21
Pasar Tekik	0	5	0	3	0	0	0	6	0	0	6	0	40	40	0
Pasar Turi	187	183	0	96	59	0	214	209	0	235	230	0	496	496	0
Pasar Angkraksari	116	120	6	64	37	6	133	138	7	146	151	7	308	308	15
Pasar Celep	16	37	0	20	5	0	18	43	0	20	47	0	42	42	0
Pasar Sangkeh	11	4	0	3	3	6	12	5	0	14	5	0	29	29	11
Pasar Grogol	17	0	0	0	5	0	20	0	0	22	0	0	46	46	0
Pasar Jejeran	204	64	0	34	65	0	233	74	0	257	81	0	542	542	0
Pasar Pleret	286	115	0	61	90	0	328	131	0	360	144	0	760	760	0
Pasar Ngipik Lor	18	11	0	6	6	0	20	12	0	23	14	0	48	48	0
Pasar Piyungan	315	72	20	38	100	20	360	82	23	396	90	25	836	836	53
Pasar Panas	77	43	0	23	24	0	88	49	0	96	54	0	203	203	0
Pasar Pundong	183	102	0	54	58	20	210	116	0	230	128	0	486	486	0
Pasar Bendosari	24	6	0	3	8	0	28	7	0	31	7	0	65	65	0
Pasar Barongan	62	9	14	5	20	13	71	10	16	78	11	17	165	165	36
Kios Palbapang	0	0	20	0	0	20	0	0	23	0	0	25	0	0	53
Jumlah	3596	1883	293	1121	911	303	4115	2155	336	4522	2368	369	7027	9140	790

Sumber: Dipenda Bantul

Lampiran IX

Potensi Retribusi Pasar Umum Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Pasar	Luas Kios	Jml. Pedagang Kios	Tarif kios	Luas Los	Jml. Pedagang Los	Tarif Los	Luas Arahana	Tarif Arahana	Jml. Pedagang Arahana	Jml. Hari Pasar	Uraian
Pasar Bantul	14	144	175	3	576	125	1,5	40	143	30	2.533.000
Pasar Niten	12	9	175	3	375	125	1,5	40	146	30	2.521.000
Pasar Jodog	0	0	175	3	120	125	2	40	86	30	753.000
Pasar Gesikan	0	0	150	3	76	100	2	30	29	30	1.100.000
Pasar Gatak	0	0	150	3	140	100	2	30	110	30	1.251.000
Pasar Semampir	0	0	150	3	45	100	2	30	74	30	618.000
Pasar Sungapan	0	0	125	3	12	75	2	20	36	30	1.100.000
Pasar Mangiran	10,5	44	175	3	150	125	2	40	71	30	5.131.816
Pasar Gumulan	0	0	150	3	37	100	1,5	30	43	30	469.2500
Pasar Sorobayan	0	0	175	3	129	125	2	40	101	30	2.188.800
Pasar Koripan	0	0	150	3	9	100	1,5	30	9	30	208.800
Pasar Jragan	0	0	125	3	14	75	1,5	20	7	30	347.7600
Pasar Imogiri	16	30	175	3	354	125	1,5	40	144	30	3.200.900.400
Pasar Dlingo	12	8	150	6	30	100	2	30	26	30	3.166.5600
Pasar Tekik	0	0	125	0	0	75	2	20	5	30	72000
Pasar Turi	0	0	150	3	187	100	2	30	183	30	645.40800
Pasar Angkrusari	14	6	175	3	116	125	2	40	120	30	557.28000
Pasar Celep	0	0	175	3	16	125	2	40	37	30	538.5600
Pasar Sangkeh	0	0	150	2	11	100	2	30	4	30	2.462.400
Pasar Grogol	0	0	125	3	17	75	2	20	0	30	826.2000
Pasar Jejeran	0	0	175	4	204	125	2	40	64	30	1.120.03200
Pasar Pleret	0	0	175	4	286	125	2	40	115	30	1.577.52000
Pasar Ngipik Lor	0	0	150	4	18	100	2	30	11	30	801.3600
Pasar Pyungan	12	21	175	4	315	125	2	40	72	30	2.447.49600
Pasar Panasan	0	0	175	4	77	125	2	40	43	30	428.18400
Pasar Pundong	0	0	175	3	183	125	2	40	102	30	2.993.97600
Pasar Bendosari	0	0	150	2	24	100	1	30	6	30	524.8800
Pasar Barongan	10,5	14	175	3	62	125	2	40	9	30	952.0200
Kios Palbapang	10,5	21	175	0	0	125		40	0	30	1.389.1500
Jumlah											1078737300

Sumber: Data Diolah

Lampiran X

Potensi Retribusi Pasar Umum Kabupaten Bantul Tahun 2001

Nama Pasar	Luas Kios	Jml. Pedagang Kios	Tarif kios	Luas Los	Jml. Pedagang Los	Tarif Los	Luas Arahan	Tarif Arahan	Jml. Pedagang Arahan	Jml. Hari Pasar	Potensi
Pasar Bantul	14	132	175	3	171	125	1,5	40	43	30	49885159
Pasar Niten	12	8	175	3	119	125	1,5	40	77	30	153925695
Pasar Jodog	0	0	175	3	38	125	2	40	45	30	24148125
Pasar Gesikan	0	0	150	3	24	100	2	30	15	30	3645000
Pasar Gatak	0	0	150	3	44	100	2	30	58	30	28773000
Pasar Semampir	0	0	150	3	14	100	2	30	39	30	7686900
Pasar Sungapan	0	0	125	3	4	75	2	20	19	30	933375
Pasar Mangran	10,5	43	175	3	47	125	2	40	38	30	111806156
Pasar Gumulan	0	0	150	3	11	100	1,5	30	23	30	2991938
Pasar Sorobayan	0	0	175	3	41	125	2	40	53	30	67622400
				12							
Pasar Koripan	0	0	150	3	3	100	1,5	30	5	30	656100
				2							
Pasar Jragan	0	0	125	3	5	75	1,5	20	4	30	1136700
Pasar Imogiri	16	30	175	3	112	125	1,5	40	76	30	122024880
				6							
Pasar Dlingo	12	7	150	6	10	100	2	30	14	30	13417920
				4							
Pasar Tekik	0	0	125	0	0	75	2	20	3	30	36000
Pasar Turi	0	0	150	3	59	100	2	30	96	30	8456400
Pasar Angkruskari	14	6	175	3	37	125	2	40	64	30	11691360
Pasar Celep	0	0	175	3	5	125	2	40	20	30	1250100
Pasar Sangkeh	0	6	150	2	3	100	2	30	3	30	291600
Pasar Grogol	0	0	125	3	5	75	2	20	0	30	2624400
				6							
Pasar Jejeran	0	0	175	4	65	125	2	40	34	30	35809200
				3							
Pasar Pleret	0	0	175	4	90	125	2	40	61	30	50504400
				3							
Pasar Ngipik Lor	0	0	150	4	6	100	2	30	6	30	2581200
				3							
Pasar Piyungan	12	20	175	4	100	125	2	40	38	30	33772680
Pasar Panas	0	0	175	4	24	125	2	40	23	30	5022000
Pasar Pundong	0	20	175	3	58	125	2	40	54	30	95338800
				12							
Pasar Bendosari	0	0	150	2	8	100	1	30	3	30	594000
Pasar Barongan	10,5	13	175	3	20	125	2	40	5	30	11415330
Kios Palbapang	10,5	20	175	0	0	125	0	40	0	30	12919095
Jumlah											1309929913

Sumber: Data Diolah

Lampiran XI

Potensi Retribusi Pasar Umum Kabupaten Bantul Tahun 2002

Nama Pasar	Luas Kios	Jml. Pedagang Kios	Tarif kios	Luas Los	Jml. Pedagang Los	Tarif Los	Luas Arahan	Tarif Arahan	Jml. Pedagang Arahan	Jumlah Hari Pasar	Potensi
Pasar Bantul	14	165	175	3	659	125	1,5	40	164	30	238037400
Pasar Niten	12	10	175	3	429	125	1,5	40	167	30	69082200
Pasar Jodog	0	0	175	3	138	125	2	40	98	30	21452400
Pasar Gesikan	0	0	150	3	87	100	2	30	33	30	10108800
Pasar Giatak	0	0	150	3	160	100	2	30	125	30	19980000
Pasar Semampir	0	0	150	3	52	100	2	30	84	30	7430400
Pasar Sungapan	0	0	125	3	14	75	2	20	41	30	1724400
Pasar Mangiran	10,5	50	175	3	172	125	2	40	81	30	58627800
Pasar Gumulan	0	0	150	3	42	100	2	30	49	30	5594400
Pasar Sorobayan	0	0	175	3	147	125	2	40	115	30	62847000
Pasar Koripan	0	0	150	12	10	100	1,5	30	10	30	13122000
Pasar Jragan	0	0	125	2	16	75	1,5	20	8	30	2678400
Pasar Imogiri	16	34	175	3	405	125	1,5	40	165	30	201861000
Pasar Dlingo	12	9	150	6	34	100	2	30	30	30	6480000
Pasar Tekik	0	0	125	6	0	75	2	20	6	30	86400
Pasar Turi	0	0	150	4	214	100	2	30	209	30	35330400
Pasar Angkruksari	14	7	175	3	133	125	2	40	138	30	10148400
Pasar Celep	0	0	175	3	18	125	2	40	43	30	3668400
Pasar Sangkeh	0	0	150	3	12	100	2	30	5	30	1404000
Pasar Grogol	0	0	125	3	20	75	2	20	0	30	3240000
Pasar Jejeran	0	0	175	3	233	125	2	40	74	30	190861200
Pasar Pleret	0	0	175	4	328	125	2	40	131	30	180892800
Pasar Ngipik Lor	0	0	150	4	20	100	2	30	12	30	8899200
Pasar Piyungan	12	23	175	4	360	125	2	40	82	30	84549600
Pasar Panasan	0	0	175	3	88	125	2	40	49	30	13291200
Pasar Pundong	0	0	175	4	210	125	2	40	116	30	154540800
Pasar Bendosari	0	0	150	3	28	100	2	30	7	30	3175200
Pasar Barongan	10,5	16	175	12	71	125	2	40	10	30	49212000
Kios Palbapang	10,5	23	175	2	0	125	0	40	0	30	15214500
Jumlah											1493790300

Sumber: Data Diolah

Lampiran XII

Potensi Retribusi Pasar Umum Kabupaten Bantul Tahun 2003

Nama Pasar	Luas Kios	jml. Pedagang Kios	Tarif kios	Luas Los	Jml. Pedagang Los	Tarif Los	Luas Araban	Tarif Araban	Jml. Pedagang Araban	Jumlah Hari Pasar	Potensi
Pasar Bantul	14	181	175	3	576	125	1,5	40	143	30	240490800
Pasar Niten	12	11	175	3	375	125	1,5	40	146	30	62094600
Pasar Jodog	0	0	175	3	120	125	2	40	86	30	18676800
Pasar Gesikan	0	0	150	3	95	100	2	30	36	30	11037600
Pasar Giatak	0	0	150	3	76	100	2	30	29	30	8834400
Pasar Semampir	0	0	150	3	140	100	2	30	110	30	17496000
Pasar Sungapan	0	0	150	3	45	100	2	30	74	30	6458400
Pasar Mangran	10,5	55	125	3	12	75	2	20	36	30	27477900
Pasar Giumulan	0	0	175	3	150	125	2	40	71	30	22294800
Pasar Sorobayan	0	0	150	3	37	100	1,5	30	43	30	4692600
	0	0	175	3	129	125	2	40	101	30	37738800
Pasar Koripan	0	0	150	2	11	100	1,5	30	11	30	2554200
				3							
Pasar Jragan	0	0	100	3	18	75	1,5	20	9	30	8845200
Pasar Imogiri	16	38	175	6	445	125	1,5	40	181	30	402663600
				3							
Pasar Dlingo	12	10	150	6	38	100	2	30	33	30	40024800
				4							
Pasar Tekik	0	0	150	6	30	100	2	30	26	30	20001600
Pasar Turi	0	0	125	3	235	100	2	30	230	30	81108000
Pasar Angkraksari	14	7	125	3	0	75	2	20	5	30	4482000
Pasar Celep	0	0	150	3	187	100	2	30	183	30	64540800
Pasar Sangkeh	0	6	175	3	116	125	2	40	120	30	50436000
Pasar Grogol	0	0	175	3	16	125	2	40	37	30	5385600
				2	11	100	2	30	4	30	2462400
Pasar Jejeran	0	0	125	3	17	75	2	20	0	30	8262000
				6							0
Pasar Pleret	0	0	175	4	204	125	2	40	64	30	112003200
				3							0
Pasar Ngipik Lor	0	0	175	4	286	125	2	40	115	30	157752000
				3							0
Pasar Piyungan	12	25	150	4	18	100	2	30	11	30	24213600
Pasar Panasan	0	0	175	3	96	100	2	30	54	30	32270400
Pasar Pundong	0	0	175	3	315	125	2	40	72	30	512373600
				12							
Pasar Bendosari	0	0	175	3	183	125	2	40	102	30	77052600
Pasar Barongan	10,5	17	175	3	78	125	2	40	11	30	11562300
Kios Palbapang	10,5	25	175	0	0	125	0	40	0	30	16537500
Jumlah											2113748100

Sumber: Data Diolah

Lampiran XIII

Potensi Retribusi Pasar Umum Kabupaten Bantul Tahun 2004

Nama Pasar	Luas Kios	jml. Pedagang Kios	Tarif kios	Luas Los	Jml. Pedagang Los	Tarif Los	Luas Arahan	Tarif Arahan	Jml. Pedagang Arahan	Jumlah Hari Pasar	Potensi
Pasar Bantul	14	382	175	3	1127	125	1,5	40	1127	30	513324000
Pasar Niten	12	23	175	3	996	125	1,5	40	996	30	173147760
Pasar Jodog	0	0	175	3	319	125	2	40	319	18	31370976
Pasar Gesikan	0	0	150	3	201	100	2	30	201	30	26101440
Pasar Gatak	0	0	150	3	371	100	2	30	371	30	48016800
Pasar Semampir	0	0	150	3	120	100	2	30	120	30	15513120
Pasar Sungapan	0	0	125	3	32	75	2	20	32	30	3081420
Pasar Mangiran	10,5	116	175	3	399	125	2	40	399	30	142024050
Pasar Gumulan	0	0	150	3	97	100	2	30	97	30	12558240
Pasar Sorobayan	0	0	175	3	342	125	1,5	40	342	30	145897200
				3	0				0		
Pasar Koripan	0	0	150	12	23	100	2	30	23	30	30041280
				3	0				0		
Pasar Jragan	0	0	125	2	38	75	1,5	40	38	30	6976800
Pasar Imogiri	16	80	175	3	939	125	1,5	40	939	30	457862760
				3	0				0		
Pasar Dlingo	12	21	150	6	80	100	2	30	80	30	70670880
				4	0				0		
Pasar Tekik	0	0	125	6	40	75	2	20	40	30	720000
Pasar Turi	0	0	150	4	496	100	2	30	496	30	64268640
Pasar Angkruksari	14	15	175	3	308	125	2	40	308	30	51683040
Pasar Celep	0	0	175	3	42	100	2	30	42	30	6545880
Pasar Sangkeh	0	11	150	3	29	125	2	40	29	30	3898800
Pasar Grogol	0	0	125	3	46	75	2	20	46	30	6812640
				2	0				0		0
Pasar Jejeran	0	0	175	3	542	125	2	40	542	30	15595200
				6	0				0		0
Pasar Pleret	0	0	175	4	760	125	2	40	760	30	21888000
				3	0				0		0
Pasar Ngipik Lor	0	0	150	4	48	100	2	30	48	30	1026000
				3	0				0		0
Pasar Piyungan	12	53	175	4	836	125	2	40	836	30	58550400
Pasar Panasan	0	0	175	3	203	125	2	40	203	30	33300540
Pasar Pundong	0	40	175	4	486	125	2	40	486	30	101560320
				4	0				0		0
Pasar Bendosari	0	0	150	3	65	100	2	30	65	30	1395360
Pasar Barongan	10,5	36	175	12	165	125	2	40	165	30	0
Kios Palbapang	10,5	53	175	2	0	125	0	40	0	30	30164400
Jumlah											2073275946

Sumber: Data Diolah

Lampiran XIV

Potensi Retribusi Pasar Hewan Kabupaten Bantul Tahun 2000

Nama Pasar	Jumlah Hewan Besar	Tarif Hewan Besar	Jumlah Hewan Kecil	Tarif Hewan Kecil	Jumlah Hari Pasaran	Potensi
Pasar Hewan Pandak	14	3000	54	750	6	5940000
Pasar Hewan Imogiri	43	3000	37	750	6	11286000
Jumlah						17226000

Sumber: Data Diolah

Lampiran XV

Potensi Retribusi Pasar Hewan Kabupaten Bantul Tahun 2001

Nama Pasar	Jumlah Hewan Besar	Tarif Hewan Besar	Jumlah Hewan Kecil	Tarif Hewan Kecil	Jumlah Hari Pasaran	Potensi
Pasar Hewan Pandak	14	3000	57	750	6	6102000
Pasar Hewan Imogiri	47	3000	38	750	6	12204000
Jumlah						18306000

Sumber: Data Diolah

Lampiran XVI

Potensi Retribusi Pasar Hewan Kabupaten Bantul Tahun 2002

Nama Pasar	Jumlah Hewan Besar	Tarif Hewan Besar	Jumlah Hewan Kecil	Tarif Hewan Kecil	Jumlah Hari Pasaran	Potensi
Pasar Hewan Pandak	16	3000	61	750	6	6750000
Pasar Hewan Imogiri	52	3000	42	750	6	13500000
Jumlah						20250000

Sumber: Data Diolah

Lampiran XVII

Potensi Retribusi Pasar Hewan Kabupaten Bantul Tahun 2003

Nama Pasar	Jumlah Hewan Besar	Tarif Hewan Besar	Jumlah Hewan Kecil	Tarif Hewan Kecil	Jumlah Hari Pasaran	Potensi
Pasar Hewan Pandak	17	3000	68	750	6	7344000
Pasar Hewan Imogiri	56	3000	46	750	6	14580000
Jumlah						21924000

Sumber: Data Diolah

Lampiran XVIII

Potensi Retribusi Pasar Hewan Kabupaten Bantul Tahun 2004

Nama Pasar	Jumlah Hewan Besar	Tarif Hewan Besar	Jumlah Hewan Kecil	Tarif Hewan Kecil	Jumlah Hari Pasaran	Potensi
Pasar Hewan Pandak	19	3000	75	750	6	8154000
Pasar Hewan Imogiri	59	3000	51	750	6	15498000
Jumlah						23652000

Sumber: Data Diolah

Lampiran XIX

Total Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 2000 – 2004

Tahun	Potensi Retribusi Pasar Umum	Potensi Retribusi Pasar Hewan	Total Potensi Retribusi
2000	1078737300	17226000	1095963300
2001	1309929913	18306000	1328235913
2002	1493790300	20250000	1514040300
2003	2113748100	21924000	2135672100
2004	2150166186	23652000	2096927946

Sumber: Data Diolah